

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara telah diatur dalam Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang kedudukan kepala daerah sebagai pemimpin daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD sebagai penyelenggara pemerintah daerah memiliki tugas untuk dalam menyusun, membahas serta menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan salah satu indeks pengukuran yang menjelaskan seberapa besar tingkat tercapainya efektivitas dan efisiensi pemerintah terhadap seluruh kegiatan yang telah dijalankan oleh pemerintah guna menyejahterahkan masyarakat sebagai bentuk perwujudan terciptanya *Good Governance* dan akuntabilitas pada kawasan pemerintah daerah. Penyusunan APBD yang bersinggungan atas keuangan yang dikelola daerah dapat diterima dalam bentuk penerimaan pendapatan dan pengeluaran daerah dalam jangka waktu satu periode. Pembangunan daerah dalam satu tahun periode tidak lepas dengan anggaran yang sudah direncanakan dan hasil penganggaran dari pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Anggaran sebagai masukan dalam kegiatan pemerintahan dan keluaran yang dituangkan dalam bentuk program pencapaian kinerja pemerintahan menunjukkan hubungan pemasukan, pengeluaran dan memberikan gambaran tentang efisiensi pemakaian anggaran. Semakin efisien anggaran pemerintahan daerah, sisa anggarannya yang semakin besar bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang lainnya. Penilaian anggaran berdasarkan efisien dalam refleksi pemerintah yang mampu mengelola keuangannya. Begitu juga mengenai pengukuran keberhasilan kinerja pemerintahan dengan menggunakan anggaran belanja yang mana semakin banyak program – program yang terlaksana, maka menunjukkan kinerja tersebut semakin efektif dan juga sebaliknya jika

menggunakan anggaran belanja, akan tetapi program – program yang ditarget tidak terlaksana, maka kinerja tersebut tidak efektif.

Dalam suatu anggaran, tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas sangat diperlukan. Dengan adanya tingkat efisiensi dan efektivitas yang sesuai dengan target menunjukkan bahwa program-program pemerintah yang dijalankan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Banyak instansi pemerintah berusaha untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas dalam penyerapan anggaran. Salah satunya, pemerintah harus merealisasikan program-program yang sudah ditetapkan, apabila target tersebut tidak diserap dengan baik maka tingkat efisien dan efektif dapat dikatakan tidak tercapai. Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dapat digunakan untuk melihat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan.

Berdasarkan penjelasan Trianto (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa bagian yang sangat diperhatikan dalam efisiensi dan efektivitas adalah tentang pengalokasian anggaran dalam memberikan hasil yang maksimal dalam perbaikan guna kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan anggaran merupakan bentuk pengembangan yang bersumber dari penyusunan anggaran dengan memerhatikan tingkat kegunaan anggaran yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Hasil penelitian Fauziah (2018) dalam Lasupu (2021) menjelaskan mengenai pelaporan anggaran dalam penyediaan informasi yang berkaitan dengan anggaran pendapatan, belanja, surplus/defisit serta pembiayaan dalam pelaporan setiap anggaran. Informasi yang dihasilkan bermanfaat dalam evaluasi oleh pengguna terkait pengalokasian sumber daya ekonomi, akuntabilitas serta taat dalam laporan yang mewadahi informasi, alokasi, serta penggunaan sumber daya yang berisikan realisasi anggaran secara general untuk evaluasi kinerja pemerintah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kota Surabaya merupakan badan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bertugas untuk menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi rencana pembangunan daerah. Dengan memiliki tugas

koordinator sebagai penyusunan perencanaan pembangunan, BAPPEDALITBANG menyusun tahapan-tahapan kegiatan yang berguna dalam pemanfaatan serta pengalokasian sumber daya yang tersedia, dengan tujuan peningkatan kesejahteraan sosial (Bappedalitbang Surabaya, 2022).

BAPPEDALITBANG Kota Surabaya setiap tahunnya di dalam pelaksanaan anggaran dituangkan dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang memuat hal mengenai ringkasan perhitungan anggaran belanja dan ringkasan perhitungan anggaran pendapatan daerah dalam satu tahunnya. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu dan efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standart kinerja atau target yang telah ditentukan (Rondonuwu, 2015). Pengukuran efisien pelaksanaan anggaran dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi anggaran pendapatan dengan realisasi anggaran belanja. Realisasi pendapatan daerah merupakan input untuk mendapatkan output berupa realiasi belanja modal yang menghasilkan pendapatan atau aset. BAPPEDALITBANG dalam melaksanakan anggarannya menggunakan belanja modal dalam memperoleh pendapatan atau aset. Efisiensi realisasi pendapatan dan realisasi belanja modal, BAPPEDALITBANG dapat mencapai kesesuaian antara pendapatan yang diperoleh dan penggunaan dana untuk belanja modal. Pendapatan yang diperoleh digunakan dengan optimal dan efisien untuk mendukung pembangunan daerah melalui belanja modal yang tepat. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya tahun 2020 terdapat permasalahan salah satunya mengenai jumlah lelang/tender pengadaan barang dan jasa di kota Surabaya dengan status gagal masih ada, meskipun bagian administrasi pembangunan telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pekerjaan lelang selama tahun anggaran. Faktor-faktor penyebab gagalnya lelang tersebut antara lain, tidak lulus evaluasi karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Perangkat Daerah, tidak ditawar, jumlah penawar pra evaluasi kurang dari 3, atau PPK tidak menyetujui.

BAPPEDALITBANG memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan lelang/tender di daerah. Potensi pendapatan sering digunakan sebagai mekanisme untuk mendapatkan kontrak atau pekerjaan pembangunan yang dapat menghasilkan pendapatan bagi BAPPEDALITBANG. Jika lelang/tender tersebut dibatalkan, peluang untuk memperoleh pendapatan dari proyek tersebut hilang.

Adapun data terkait realisasi anggaran belanja modal 5 tahun terakhir dari tahun anggaran 2016-2020 BAPPEDALITBANG Kota Surabaya sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Sisa Anggaran Belanja Modal pada Belanja Daerah

Tahun	Target Belanja Modal	Realisasi Belanja Modal	Sisa Belanja Modal
2016	2.144.518.665.570	1.789.394.044.827	355.124.620.743
2017	2.844.371.811.527	2.517.973.748.885	326.398.062.642
2018	2.720.098.071.386	2.430.061.039.309	290.037.032.077
2019	2.952.664.659.049	2.754.304.824.082	198.359.834.967
2020	1.862.266.772.134	1.583.663.159.605	278.603.612.529

Sumber : data olah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2016-2020

Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk mendapatkan pendapatan dan sumber dari belanja modal salah satunya berasal dari pendapatan daerah. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin besar efektif organisasi, program atau kegiatan (Rondonuwu, 2015). Pengukuran efektif pelaksanaan anggaran dapat diperoleh dengan membandingkan anggaran pendapatan dengan realiasi pendapatan. Dengan adanya rencana anggaran yang jelas, BAPPEDALITBANG dapat mengarahkan penggunaan pendapatan dengan efektif. Pendapatan digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan, menghasilkan manfaat yang diharapkan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah secara keseluruhan. Dengan memastikan efektivitas anggaran pendapatan daerah, pemerintah daerah dapat mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan, memberikan pelayanan publik yang lebih baik, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Efektivitas ini juga berperan dalam membangun kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan dan pembangunan.

Adapun data terkait realisasi anggaran belanja modal 5 tahun terakhir dari tahun anggaran 2016-2020 BAPPEDALITBANG Kota Surabaya sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Sisa Anggaran Pendapatan Daerah

Tahun	Target Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Sisa Pendapatan Daerah
2016	6.720.301.543.490	6.827.414.522.004	(107.112.978.514)
2017	7.904.894.969.358	8.015.168.655.617	(110.273.686.259)
2018	8.079.142.194.268	8.170.854.369.268	(91.712.175.000)
2019	8.733.224.623.734	8.765.147.837.783	(31.923.214.049)
2020	8.111.361.342.561	7.545.200.048.928	566.161.293.633

Sumber : data olah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2016-2020

Kedua tabel diatas menunjukkan sisa anggaran belanja modal dan sisa anggaran pendapatan daerah dari tahun 2016-2020, di mana sisa anggaran belanja modal tahun 2016-2020 masih tersedia sedangkan sisa anggaran pendapatan daerah tahun 2016-2020, hanya di tahun 2020 yang masih tersedia dan tahun 2016-2019 melebihi target yang ditentukan. Sehingga, apakah bisa BAPPEDALITBANG kota Surabaya tahun 2016-2020 dikatakan telah melaksanakan anggaran secara efisien dan efektif, karena hal tersebut merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan penjelasan di atas kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran yang bisa dipertanggung jawabkan memiliki keterkaitan dengan efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2016-2020 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kota Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah bagaimana efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja tahun anggaran 2016-2020 pada BAPPEDALITBANG Kota Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis efisiensi pelaksanaan anggaran belanja tahun anggaran 2016-2020 pada BAPPEDALITBANG Kota Surabaya.
2. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan anggaran belanja tahun anggaran 2016-2020 pada BAPPEDALITBANG Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah dan menambah wawasan, pengalaman, serta pemahaman mengenai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja tahun anggaran 2016-2020 pada BAPPEDALITBANG Kota Surabaya.

2. Bagi Kantor BAPPEDALITBANG Kota Surabaya

Hasil penelitian ini sebagai gambaran, masukan dan evaluasi bagi Kantor BAPPEDALITBANG Kota Surabaya.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis atau pengembangan penelitian lebih lanjut.